

RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang menentukan arah dan tujuan jangka pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, RKPD Perubahan Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang berisi uraian tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi operasional dan juga sebagai media pengendalian, arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa penyusunan dan pembuatan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020, ini masih belum sempurna, oleh karena itu masih sangat diperlukan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakannya lagi, serta dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan di wilayah kabupaten Sukabumi.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai sesuai harapan serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian Visi dan Misi.

Palabuhanratu, 31 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

ACEP SAEFFUDIN, S.IP, M.Si NIP. 19601217 198603 1 008



DAFTAR ISI

KATA F	PENGANTAR	i
DAFTA	R ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN	
	CAPAIAN RENJA 2020	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
	2.4 Rekapitulasi Usulan Terhadap Rancangan RKPD Perubahan	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	27
	3.3 Program dan Kegiatan	28
	3.4 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2020	29
BAB IV	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	32
	4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2020	32
	4.2 Rencana Kegiatan Tahun 2020	34
DADM	DENITTID	27

BAB I





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, adalah merupakan dokumen awal perencanaan program dan kegiatan untuk untuk 6 (enam) bulan ke depan yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional tentang visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, serta berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

2



- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabipaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020;
- 25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
- 26. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
- 27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

- Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas pelaksanaan program secara terukur;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- Memberikan informasi bagi para *stakeholders* tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja.

4



1.3.2. Tujuan

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja memuat beberapa pokok bahasan, untuk memudahkan pembuatan maupun dapat dibaca secara sistematis, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN **CAPAIAN RENJA 2020**

Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Perubahan tahun 2020, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi PD, Rekapitulasi Terhadap Rancangan RKPD Perubahan dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD, serta program dan kegiatan PD.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

5



Bab ini berisi prioritas pembangunan tahun 2020 dan rencana kegiatan tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II



BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja tahun 2019 dan Tahun 2020, selanjutnya secara rinci tugas pokok dan fungsi tersebut diterjemahkan dalam misi, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sat. Pol. PP Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2019		
	(output)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	2.545.720.500	2.538.413.639	99,71
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.422.420.500	2.415.114.639	99,70
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100%	123.300.000	123.299.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	939.919.500	928.107.000	98,74
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Fasilitas Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100%	96.500.000	95.550.000	99,02
Pengadaan Perangkat Komputer	Terpenuhinya Perangkat Komputer	2 Jenis	2 Jenis	100%	82.000.000	75.862.500	92,52
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Terpeliharanya AC Kantor	14 Unit	14 Unit	100%	8.540.000	8.525.000	99,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Bangunan	1 Bangunan	100%	26.700.000	25.716.000	96,31



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2019		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Gedung Kantor							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Terpeliharanya Genset Kantor	1 Unit	1 Unit	100%	15.000.000	14.995.000	99,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dilapangan	35 unit	35 unit	100%	644.049.500	640.888.500	99,51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer Kantor	10 unit	10 unit	100%	13.000.000	13.000.000	100,00
Pengadaan Alat Penunjang Keamanan	Tersedianya Alat Penunjang Keamanan	8 Jenis	8 Jenis	100%	54.130.000	53.570.000	98,97
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan presentase disipilin aparatur	104 Stel	104 Stel	100%	522.845.000	519.536.900	99,37
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Seragam/Pakaian Dinas Satpol PP	104 Stel	102 Stel	100%	323.945.000	322.268.900	99,48
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Seragam/Pakaian Dinas Satpol PP	101Stel	101 Stel	100%	20.400.000	20.247.000	99,25
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.663.945.600	92,43
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	3 keg / 50 orang	3 keg / 50 orang	100%	154.075.000	153.768.500	99,80
Operasi Yustisi dan Penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah pelanggaran PERDA	30 Kasus	30 Kasus	100%	200.000.000	197.190.000	98,60
Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Jumlah anggota LINMAS desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	90 orang	90 orang	100%	285.825.000	285.220.000	99,79



	1			,			1
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2019		
	(output)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	600 orang	600 orang	100%	121.140.000	120.909.000	99,81
Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	240 keg	240 keg	100%	441.970.000	439.520.000	99,45
Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	3 keg	1 keg	30%	125.000.000	2.015.600	1,61
Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	12 keg	12 keg	100%	300.000.000	297.977.500	99,33
Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan PEKAT (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	55 keg	55 keg	100%	100.000.000	98.091.000	98,09
Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	21keg	21 keg	100%	72.300.000	69.254.000	95,79



Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Capaian Renja Perubahan Sat. Pol. PP s/d Triwulan II Tahun 2020

			d IIIwui					
Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	program dan keluaran kegiatan rja SKPD tahun 2020 am			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020			
	Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	45,83%	45,83%	2.820.392.000	1.292.684.794	45,83%	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat	12 Bulan	6 Bulan	46,00%	2.725.712.000	1.253.764.794	46,00%	
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	6 Bulan	41,11%	94.680.000	38.920.000	41,11%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	38,17%	38,17%	955.813.500	364.871.700	38,17%	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7-7-0-0-0	6 Jenis	13,02	13,02	142.680.000	18.571.000	13,02	
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC		20 Unit	54,69	54,69	16.000.000	8.750.000	54,69	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase	1 Bangunan	0,00	0,00	149.030.000	0.00	0,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	peningkatan sarana dan prasarana	1 Unit	45,46	45,46	15.540.000	7.065.000	45,46	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	aparatur	1 Paket	0,00	0,00	14.100.000	0.00	0,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		36 unit	53,49	53,49	603.933.500	323.035.700	53,49	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		25 unit	51,27	51,27	14.530.000	7.450.000	51,27	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat Disiplin Aparatur	40 Orang	0 Orang	0,00%	49.678.000	0,00	0,00	
Pembinaan, Fasilitasi dan Penunjang PPNS	Persentase ASN yang kompeten	40 Orang	0 Orang	0,00%	49.678.000	0,00	0,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	100%	36,64%	36,64%	128.590.000	47.116.200	36,64	



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	program dan keluaran kegiatan inerja SKPD tahun 2020 ogram			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020		
	Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja		21,27%	30,34	30,34	27.355.000	8.300.500	30,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Persentase	18,17%	6,68	6,68	23.360.000	1.560.000	6,68
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Perangkat Daerah	25,98%	57,78	57,78	33.410.000	19.305.000	57,78
Penyusunan Laporan Keuangan		34,58%	40,37	40,37	44.465.000	17.950.700	40,37
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Penegakan PERDA	90%	20,94%	20,94%	4.402.026.500	921.975.845	20,94
Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		41,69%	0,00	0,00	2.039.052.500	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur		3,08%	33,66	33,66	150.550.000	50.675.000	33,66
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Satpol PP		1,25%	22,06	22,06	61.200.000	13.500.000	22,06
Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan PERDA		1,10%	0,00	0,00	53.780.000	0,00	0,00
Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah		3,80%	17,50	17,50	186.010.000	32.550.000	17,50
Pemeliharaan Operasi Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah		16,76%	78,91	78,91	819.810.000	646.930.000	78,91
Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin	Persentase Penegakan	1,11%	0,00	0,00	54.254.000	0,00	0,00
Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan PEKAT	PERDA	2,38%	13,51	13,51	116.340.000	15.712.000	13,51
Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya		1,84%	30,00	30,00	90.000.000	27.000.000	30,00
Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan		2,14%	11,71	11,71	104.750.000	12.270.000	11,71
Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan PERDA di Wilayah Perbatasan		0,95%	0,00	0,00	46.690.000	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa		6,67%	21,94	21,94	326.390.000	71.618.845	21,94
Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum		6,20%	12,22	12,22	303.200.000	37.040.000	12,22



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020		Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2020			
	Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)		0,51%	33,60	33,60	25.000.000	8.400.000	33,60
Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)		0,51%	25,12	25,12	25.000.000	6.280.000	25,12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah: "Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat".

2.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan



- pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

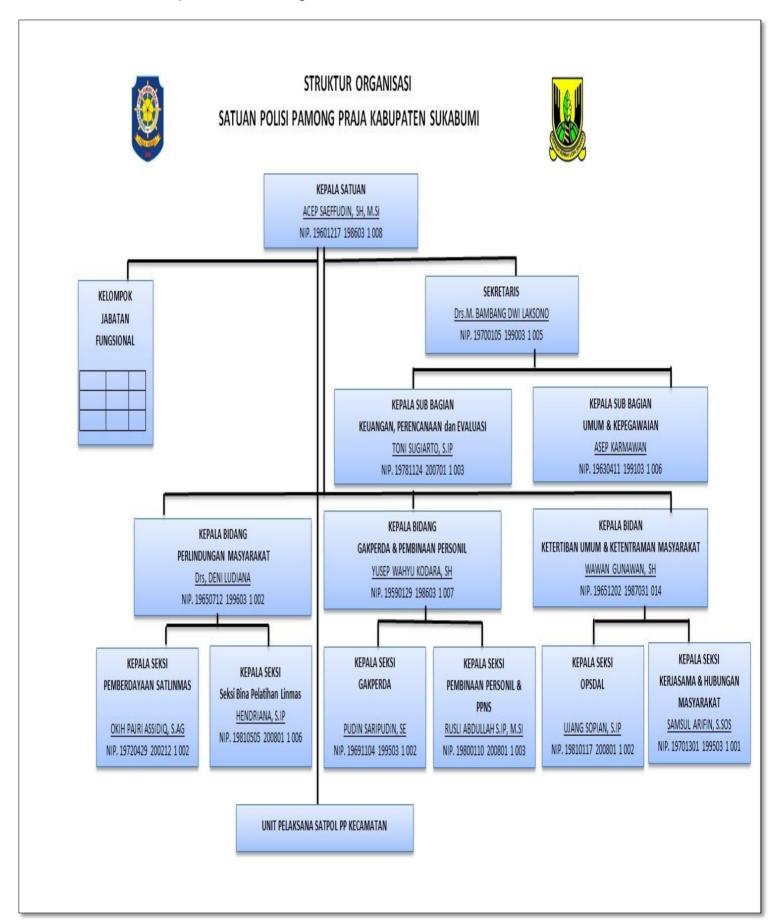
2.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil, terdiri atas:
 - Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - Seksi Pembinaan Personil dan PPNS.
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.



- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Pemberdayaan Sat Linmas; dan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional





2.2.4 Sumber Daya

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, komposisi pegawai sampai dengan Juni 2020 berjumlah 102 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

2. S M a b 3. K P	JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala	=	JUMLAH 1 orang
2. S N a b		=	1 orang
3. KP	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala		i Ulaliy
2. S N a b 3. K P			
3. KP	Bidang.		
3. KP	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	=	1 orang
3. KP	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing:	=	
3. KP	a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	=	1 orang
3. KP	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 1 orang PNS dan 4 orang BANPOL	=	5 orang
N a	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	=	1 orang
N a	- membawahi dan mengkoordinir 7 orang staf yang terdiri dari 4 orang PNS dan 3 orang BANPOL,	=	7 orang
b	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil	=	1 orang
b	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a. Kepala Seksi Perundang-undangan Daerah	=	1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	=	5 orang
4. K	b. Kepala Seksi Pembinaan Personil dan PPNS	=	1 orang
4. K	- membawahi dan mengkoordinir 7 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang BANPOL	=	7 orang
	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	=	1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 29 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 24 orang BANPOL	=	29 orang
b	b. Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	=	1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 25 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 20 orang BANPOL	=	25 orang
5. K	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan	=	1 orang
	Masyarakat		
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	=	5 orang
b	b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	=	1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 4 orang PNS dan 2 orang BANPOL	=	6 orang
	Jumlah Keseluruhan	=	102 orang

Pada tabel tersebut terlihat bahwa komposisi personil/staf Sat.Pol.PP yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi perubahan nomenklatur bidang-bidang dan juga seksi-seksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2012. Sehingga pengaturan gerak dan operasional anggota secara terkonsentrasi ada dibawah kendali Kepala Satuan. Hal tersebut



dimaksudkan agar pada setiap kegiatan terdapat komando yang jelas dan terpusat dari Kepala Satuan, sehingga dimungkinkan terjadi sinergitas setiap fungsi bidang dan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Selain itu dengan adanya salah satu bidang yang memiliki fungsi pembinaan anggota Satlinmas yang sampai saat ini sedang dilakukan verfikasi data dalam rangka membangun sistem database yang dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar mengelola sistem pembinaan dan apabila dimungkinkan untuk memfasilitasi kesejahteraan para anggota sat linmas yang berjumlah lebih dari 16 ribu orang sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap peran dan fungsi linmas di wilayah.

Menyikapi hal tersebut diatas, dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik secara individu maupun kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi.

Untuk dapat mengetahui komposisi SDM pada Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

KOMPOSISI SDM

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI
PER JUNI 2020

Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Golongan IV/c	1
2	PNS Golongan IV/b	-
3	PNS Golongan IV/a	4
4	PNS Golongan III/d	6
5	PNS Golongan III/c	2
6	PNS Golongan III/b	5
7	PNS Golongan III/a	1
8	PNS Golongan II/d	5
9	PNS Golongan II/c	16
10	PNS Golongan II/b	3
11	PNS Golongan II/a	-



12	PNS Golongan I/d	-
13	PNS Golongan I/c	-
14	PNS Golongan I/b	-
15	PNS Golongan I/a	-
16	Pegawai Honor/Kontrak	59
	102	

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	22
3	D3	1
4	D1	1
5	SMA	71
6	SMP	2
7	SD	
	102	

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah		
1	Pria	84		
2	2 Wanita			
	102			

Berdasarkan data komposisi SDM yang tampak pada tabel di atas, terlihat bahwa staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SMA sejumlah 71 orang (69,61%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat anggota Sat.Pol.PP sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang sangat identik dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat diperlukan rekruitmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas Sat.Pol.PP.



2.2.5 Sarana dan Prasarana

Setelah satu tahun lebih menempati gedung kantor yang beralamat di Jln. Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Kec. Palabuhanratu, kami evaluasi bahwa secara umum keberadaan prasarana yang kami miliki sangat mendukung produktivitas kinerja. Hal ini dikarenakan kami dapat mengatur dan menempatkan para pegawai sesuai dengan bidang dengan leluasa.

Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi bangunan yang merupakan bangunan lama ternyata pada beberapa bagian membutuhkan biaya perbaikan dan penambahan beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Oleh karena itu secara bertahap kami berupaya mengajukan tambahan pembangunan beberapa fasilitas pendukung dan juga biaya renovasi yang cukup besar.

Selain aset bangunan yang dimiliki, Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi telah memiliki sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta beberapa sarana kendaraan operasional. Adapun sarana kendaraan operasional beberapa diantaranya sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, sehingga memerlukan peremajaan. Secara terperinci sarana dan prasarana yang kami miliki disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.5

KONDISI SARANA PRASARANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

	Sarana Prasarana	Vol	Sat	Kondisi			
No				Doile	Rusak Berat/		
				Baik	Kurang Baik		
1	2	3	4	5	6		
1	Gedung/Kantor	10	Unit	10	-		
2	Minibus	6	Unit	6	-		
3	Pick Up	7	Unit	7	-		
4	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	-		
5	Kendaraan Roda 6/Truk	1	Unit	1	-		
6	Komputer	24	Unit	23	1		
7	Keyboard	1	Buah	-	1		
8	Laptop	6	Unit	6	-		
9	Notebook	14	Unit	14	-		



10	Unit Transceiver SSB Portable	7	Unit	7	-
11	Printer	43	Buah	33	10
12	Scaner	151	Buah	151	-
13	Kursi Kerja	97	Buah	96	1
14	Kursi Lipat	110	Buah	107	3
15	Kursi Rapat	60	Buah	60	-
16	Meja Kerja	39	Buah	38	1
17	Meja Rapat	12	Buah	11	1
18	Meja Komputer	1	Buah	-	1
19	Meja Tulis	6	Buah	5	1
20	Kursi Tamu	16	Set	13	3
21	Lemari Rak/Arsip	6	Buah	6	-
22	Lemari Kayu	9	Buah	6	3
23	Lemari Locker	1	Buah	1	-
24	Filling Cabinet	33	Buah	27	6
25	Brankas	2	Buah	2	-
26	Telepon/Faximile	5	Buah	2	3
27	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	15	Jenis	15	-
28	Mesin Tik	5	Buah	2	3
29	Calculator / Mesin Hitung	1	Buah	-	1
30	White Board	6	Buah	5	1
31	Alat Penghancur	4	Buah	4	-
32	Camera	11	Buah	11	-
33	Camera Handycam	4	Buah	4	-
34	Infocus	3	Unit	3	-
35	Televisi	9	Buah	7	2
36	Kipas Angin	13	Buah	13	-
37	AC	16	Unit	16	-
38	Kaca Hias	8	Buah	7	1
39	Dispenser	11	Buah	9	2
40	Kulkas/Lemari Es	2	Buah	2	-
41	Tabung dan Kompor Gas	2	Buah	-	2
42	Megaphone	2	Buah	-	2
43	Papan Panel	154	Buah	154	-
44	Kasur Alumunium	70	Buah	70	-
45	Tenda	3	Buah	3	-



46	Handy Talky	23	Buah	23	-
47	Lampu Senter	14	Buah	14	-
48	Saluran Penyimpanan Air	3	Buah	3	-
49	Mesin Genset	2	Unit	2	-

2.2.6 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 412.591,92 ha, dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar 0-2.960 m. Terletak antara 6°57′-7°25′ LS dan 106°49′-107°00′ BT, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bogor Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan

Samudera Hindia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Secara Administratif juga berbatasan langsung dengan Kota Sukabumi, dimana posisi Kota Sukabumi dikelilingi oleh beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luasnya dimana terdiri dari 47 Kecamatan dan 386 Desa dan Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan



Sat.Pol.PP, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sat.Pol.PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Memelihara Trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksanaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Disamping sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut diatas Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi juga menjalankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diantaranya sebagai berikut :

- Fasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat.
- Pengamanan dan Pengawalan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam berbagai acara resmi terutama Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
- 3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- 4. Pengamanan asset vital milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan isu strategis yang harus segera ditangani sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Isu strategis tersebut adalah :

- 1. Penyakit masyarakat.
- 2. Penataan sektor informal.
- 3. Reformasi birokrasi.



4. Profesionalisme aparatur.

Isu strategis tersebut sebagai bahan perencanaan yang akan di selesaikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di tuangkan dalah Renstra.

2.4 Rekapitulasi Usulan Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 di susun berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang juga berpedoman kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sukabumi melaksanakan Kabupaten dalam pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 berdasarkan analisis kebutuhan program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung tercapainya visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Adapun tabel usulan perubahan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan sebagai berikut :



Tabel 2.6 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

HASIL PERUBAHAN KKPD 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

No	Kegiatan	Output Kegiatan Murni	Output Kegiatan Pergeseran	Output Kegiatan Rencana Perubahan	Sumber Anggaran	Lokasi	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Pergeseran	Pagu Rencana Perubahan
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dilayani : 150 Orang		Jumlah Pegawai yang dilayani : 150 Orang	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	94,680,000.00	65,610,000.00	94,680,000.00
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli : 50 Unit		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli : 50 Unit	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	142,680,000.00	43,850,000.00	142,680,000.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer yang dipelihara : 19 Unit	Jumlah Komputer yang dipelihara : 14 Unit	Jumlah Komputer yang dipelihara : 19 Unit	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	14,530,000.00	10,950,000.00	14,530,000.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan roda dua yang dipelihara 30 Unit; Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara 9 Unit;		Jumlah Kendaraan roda dua yang dipelihara 30 Unit; Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara 9 Unit;	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	603,933,500.00	603,933,500.00	603,933,500.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Genset yang dipelihara 1 Unit;	Genset yang dipelihara 1 Unit;	Genset yang dipelihara 1 Unit;	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	15,540,000.00	13,495,900.00	15,540,000.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	149,030,000.00	149,030,000.00	149,030,000.00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	16,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00
9	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya		*	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya : 110 Orang	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	200,000,000.00
10	Pengadan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu : 110 Orang	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu	0.00	0.00	200,000,000.00

RENJA PERUBAHAN SATPOLPP

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	23,360,000.00	10,400,000.00	23,360,000.00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	27,355,000.00	11,945,000.00	27,355,000.00
13	Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	33,410,000.00	19,825,000.00	33,410,000.00
14	Penyusunan Laporan Keuangan	РІК РЭК	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	44,465,000.00	22,630,700.00	44,465,000.00
15	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	150,550,000.00	70,250,100.00	150,550,000.00
16	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Satpol PP	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	61,200,000.00	13,500,000.00	61,200,000.00
17	Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan PERDA	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	53,780,000.00	0.00	53,780,000.00
18	Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	116,340,000.00	15,712,000.00	116,340,000.00
19	Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	186,010,000.00	32,550,000.00	186,010,000.00
20	Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Keterithan Umum serta Pengamanan Wilayah	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	819,810,000.00	912,445,000.00	1,305,080,000.00
21	Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin	PIK P3K	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu	54,254,000.00	0.00	54,254,000.00

RENJA PERUBAHAN SATPOLPP

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



22	Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu WIP dan Pejabat Negara Lainnya	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	90,000,000.00	27,000,000.00	90,000,000
23	Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	104,750,000.00	12,270,000.00	104,750,000.00
24	Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	326,390,000.00	72,138,856.00	326,390,000.00
25	Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum	Pagu Indikatif	DI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	303,200,000.00	37,040,000.00	303,200,000.00
26	Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	25,000,000.00	8,400,000.00	25,000,000.00
27	Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	25,000,000.00	6,280,000.00	25,000,000.00
28	Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilu Legislatif, Pemilhan Presiden, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
29	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	2,725,712,000.00	2,429,792,000.00	2,725,712,000.00
30	Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan PERDA di Wilayah Perbatasan	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cmanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	46,690,000.00	0.00	46,690,000.00
31	Pembinaan, Fasilitasi dan Penunjang PPNS	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggui Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	49,678,000.00	0.00	49,678,000.00
32	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pagu Indikatif	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu	0.00	0.00	0.00

RENJA PERUBAHAN SATPOLPP

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



33	Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	APBD Provinsi	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
34	Rehabilitasi Gedung Kantor	APBD Provinsi	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
35	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	APBD Provinsi	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
36	Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	2,039,052,500.00	0.00	723,750,000.00

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Pada prinsipnya rencana kerja perubahan yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk program Pemeliharaan Keamanan, Ketertban Dan PerlindunganMasayarakat.

BAB III





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas Kebijakan Nasional dan Propinsi diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu " penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin di capai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

1. Tujuan

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Sasaran

- Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.
- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana



3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 telah diselaraskan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020 didalam melaksanakan program tersebut terdapat prinsip-prinsip pengutamaan yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan program yaitu meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Komputer
 - c. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
 - e. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Genset
 - f. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala AC
- 3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi, dan Penunjang PPNS
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - b. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP
 - c. Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda



- d. Kegiatan Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- e. Kegiatan Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah
- g. Kegiatan Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin
- Kegiatan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu
 VVIP dan Pejabat Negara Lainnya
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI,
 Polri dan Kejaksaan
- j. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
- k. Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum
- Kegiatan Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)
- m. Kegaiatan Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)
- n. Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan
- o. Kegiatan Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Menjabarkan rumusan Visi dan Misi dan Arah Kebijakan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja, dengan mendasarkan diri pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan, sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi, 2016-2021. Penyesuaian rumusan visi, misi dan arah kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan RPJM Daerah adalah untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kebijaksanaan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan



kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut di atas, maka telah disepakati rumusan arah kebijakan teknis sebagai berikut:

- Mendekatkan kesenjangan ratio Personil Sat. Pol. PP dengan Jumlah Penduduk secara bertahap dari 1 : 7000 menjadi 1 : 2000 (dari 300 Personil menjadi 1000 Personil);
- 2. Memberdayakan masyarakat dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan ;
- 3. Menyempurnakan data base bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perangkat pemutakhirannya secara reguler sebagai alat bantu perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja;
- 4. Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan personil Sat. Pol. PP/PPNS melalui pendidikan dan pelatihan terfokus;
- 5. Mendalami dan menyeleksi aspek-aspek budaya dan kearifan lokal yang akan dituangkan ke dalam kerangka acuan dalam penentuan kebijakan ;
- 6. Mendorong dan memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat agar ikut serta ambil bagian aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- 7. Meningkatkan sarana dan prasana guna menunjang pelaksanaan tugas;
- 8. Meningkatkan kesejahteraan personil Sat. Pol. PP/PPNS;
- 9. Menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengandung Sanksi ;
- 10. Melakukan Penyuluhan/Sosialisasi dan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat ;
- 11. Melaksanakan Pengamanan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Tamu Penting VVIP.
- 12. Melaksanakan secara Intensif/berkala Operasi Yustisi;
- 13. Melakukan koordinasi dengan OPD dan Lembaga terkait lainnya;
- 14. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah.

Rumusan rencana program untuk tahun 2020 tidak lepas dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan mengacu pada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, baik tujuan, sasaram, strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, secara keseluruhan pada tahun 2020.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran dari Rencana Strategis tahun 2020
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

	i elayahan Satuah i olisi i among i raja Nabupaten Sukabum								
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Eksis- Ting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	
		umber Daya Man		\-'/		(,,	(0)	(' ')	
1	Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan	Predikat SAKIP	100%	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Persentase Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	100%	
	sejak dini dalam lingkungan yang religius		100%		Persentase Laporan Perangkat Daerah	%	100	100%	
			100%		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	
			100%	Meningkatnya kapabilitas ASN yang profesional	Persentase ASN yang kompeten	%	100	100%	
		Indeks Pembangunan Manusia	90%	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan PERDA	%	90	90%	

BAB IV





BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang penyusunannya berpedoman kepada Visi, Misi dan Arah Kebijakan, sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi, 2016 – 2021.

Implementasi dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya akan berpegang kepada komitmen kebijakan yang menyangkut program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi/monitoring.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2020, garis-garis besar prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020.

- 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - c. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - d. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - h. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Komputer
 - j. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - k. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
 - I. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Genset
 - m. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - n. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala AC
- 3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur
 - c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - d. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu



- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi, dan Penunjang PPNS
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - p. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - q. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP
 - r. Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda
 - s. Kegiatan Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - t. Kegiatan Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah
 - u. Kegiatan Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah
 - v. Kegiatan Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin
 - w. Kegiatan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya
 - x. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan
 - y. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
 - z. Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum
 - aa. Kegiatan Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)
 - bb. Kegaiatan Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)
 - cc. Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan
 - dd. Kegiatan Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



4.2. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

Rencana Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) berikut rencana capainnya (*target*). Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi

			T	AHUN 2020				
(i	Sasaran		-		Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Katerangar
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Predikat SAKIP	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	
		100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	

RENJA PERUBAHAN SATPOLPP

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



		100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Pembinaan, Fasilitasi, dan Penunjang PPNS	Tingkat disiplin aparatur Persentase ASN yang kompeten	%	100	
		100%	Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Laporan Perangkat Daerah	%	100	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Indeks Pembangunan Manusia	90%		Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan	Persentase Penegakan PERDA	%	90	

RENJA PERUBAHAN SATPOLPP

KAB. SUKABUMI TAHUN 2020



Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020) Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT) Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan
Wilayah Perbatasan Pengamanan Wilayah

BAB V





BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini yang dapat kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaima mestinya. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

Semoga apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Palabuhanratu, 31 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI,

> ACEP SAEFFUDIN, SH. M.Si NIP. 19601217 198603 1 008



HASIL PERUBAHAN RKPD 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

No	Kegiatan	Output Kegiatan Murni	Output Kegiatan Pergeseran	Output Kegiatan Rencana Perubahan	Sumber Anggaran	Lokasi	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Pergeseran	Pagu Rencana Perubahan
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dilayani : 150 Orang		Jumlah Pegawai yang dilayani : 150 Orang	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	94,680,000.00	65,610,000.00	94,680,000.0
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli : 50 Unit		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli : 50 Unit	Pagu Indikatif	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	142,680,000.00	43,850,000.00	142,680,000.0
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer yang dipelihara : 19 Unit	Jumlah Komputer yang dipelihara : 14 Unit	Jumlah Komputer yang dipelihara : 19 Unit	Pagu Indikatif	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	14,530,000.00	10,950,000.00	14,530,000.0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan roda dua yang dipelihara 30 Unit; Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara 9 Unit;		Jumlah Kendaraan roda dua yang dipelihara 30 Unit; Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara 9 Unit;	Pagu Indikatif	31. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	603,933,500.00	603,933,500.00	603,933,500.0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Luas Halaman dan Taman yang dipelihara 200 m2;	Pagu Indikatif	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	14,100,000.00	0.00	14,100,000.0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Genset yang dipelihara I Unit;	Genset yang dipelihara 1 Unit;	Genset yang dipelihara 1 Unit;	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	15,540,000.00	13,495,900.00	15,540,000.0
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Luas Gedung Kantor yang di pelihara 200 m2;	Pagu Indikatif	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	149,030,000.00	149,030,000.00	149,030,000.0
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Jumlah AC yang diperlihara 28 Unit;	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	16,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.0
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-		Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya : 110 Orang	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	200,000,000.0
10	Pengadan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu : 110 Orang	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu	0.00	0.00	200,000,000.0

21	Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin	РІК РЗК	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu	54,254,000.00	0.00	54,254,000.00
20	Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah	Pagu Indikatif	Jil. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	819,810,000.00	912,445,000.00	1,305,080,000.00
19	Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	186,010,000.00	32,550,000.00	186,010,000.00
18	Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Pagu Indikatif	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	116,340,000.00	15,712,000.00	116,340,000.00
17	Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan PERDA	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	53,780,000.00	0.00	53,780,000.00
16	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Satpol PP	Pagu Indikatif	Jil. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	61,200,000.00	13,500,000.00	61,200,000.00
15	Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhhanratu Kabupaten Sukabumi;	150,550,000.00	70,250,100.00	150,550,000.00
14	Penyusunan Laporan Keuangan	РІК РЗК	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	44,465,000.00	22,630,700.00	44,465,000.00
13	Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	33,410,000.00	19,825,000.00	33,410,000.00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Pagu Indikatif	Ji. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	27,355,000.00	11,945,000.00	27,355,000.00
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Pagu Indikatif	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuharratu Kabupaten Sukabumi;	23,360,000.00	10,400,000.00	23,360,000.00

22	Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya	Pagu Indikatif Cimanggu 90,00 Pagu Indikatif Cimanggu 90,00 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	,000.00 27,000,000.00	90,000,000.00
23	Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan	Pagu Indikatif Cimanggu 104,75 Pagu Indikatif Cimanggu 104,75 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	,000.00 12,270,000.00	104,750,000.00
24	Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Pagu Indikatif Cimanggu 326,39 Pagu Indikatif Cimanggu 326,39 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	,000.00 72,138,856.00	326,390,000.0
25	Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum	Pagu Indikatif Cimanggu 303,20 Pagu Indikatif Cimanggu 303,20 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	,000.00 37,040,000.00	303,200,000.00
26	Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)	Pagu Indikatif Cmanggu 25,000 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	,000.00 8,400,000.00	25,000,000.00
27	Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal / Barang Tanpa Cukai (DBHCHT)	Pagu Indikatif Cimanggu 25,000 Pagu Indikatif Kabupaten Sukabumi;	,000.00 6,280,000.00	25,000,000.00
28	Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemiliu Legisiatif, Pemilihan Presiden, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi	Pagu Indikatif Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00 0.00	0.0
29	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pagu Indikatif Cimanggu 2,725,71. Pagu Indikatif Cimanggu 2,725,71. Rabupaten Sukabumi;	,000.00 2,429,792,000.00	2,725,712,000.00
30	Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan PERDA di Wilayah Perbatasan	Pagu Indikatif Cimanggu 46,69 Pagu Indikatif Cimanggu 46,69 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	46,690,000.00
31	Pembinaan, Fasilitasi dan Penunjang PPNS	Pagu Indikatif Palabuhanratu Roud Pagu Indikatif Palabuhanratu Rabupaten Sukabumi;	0.00	49,678,000.00
32	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pagu Indikatif II. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cmanggu	0.00 0.00	0.00

33	Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	APBD Provinsi	Jl. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
34	Rehabilitasi Gedung Kantor	APBD Provinsi	3l. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
35	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	APBD Provinsi	JI. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggul Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	0.00	0.00	0.00
36	Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pagu Indikatif	31. Pasanggarahan No. 4 Batunggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;	2,039,052,500.00	0.00	723,750,000.00